



BULLETIN

CATATAN HITAM

TAHUN 2024



**KABINET 'GEMUK'
MERAH PUTIH**



**KAMPUS
INKLUSIF
DISABILITAS**



**SOROTAN BEM
FISIP**



Salam Redaksi

Salam hangat dan bahagia untuk seluruh Orangers dan pembaca setia karya LPM ORANGE. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan publikasi Buletin Orange.

Di penghujung tahun 2024 ini, LPM ORANGE kembali hadir menemani pembaca dengan Buletin edisi terbaru. Melalui tulisan ini, kami mengajak pembaca untuk bersama-sama menyoroti isu penting yang dikupas tuntas di dalam "Catatan Hitam". Sebagai media mahasiswa yang menjunjung tinggi independensi, kami berkomitmen untuk terus menyajikan informasi yang akurat dan berimbang.

Kampus inklusif untuk mahasiswa disabilitas adalah isu yang menuntut komitmen nyata dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang setara. Selain itu, fenomena kabinet 'gemuk' Merah Putih mencerminkan kebijakan yang perlu dipertanyakan efektivitasnya. Sementara itu, evaluasi terhadap BEM FISIP menjadi pengingat untuk memastikan program kerja yang dijalankan benar-benar berdampak pada mahasiswa, bukan sekadar seremonial belaka. Isu-isu ini kami angkat sebagai refleksi terhadap tantangan keadilan, transparansi, dan kualitas kehidupan kampus yang hingga kini belum mendapat perhatian yang seharusnya.

Tidak lupa kami ucapkan terimakasih banyak kepada seluruh anggota LPM Orange atas kontribusi terbaiknya dalam pembuatan Buletin ini. Kami juga mengapresiasi pembaca yang mendukung karya kami, serta narasumber yang telah berbagi aspirasi dan pengetahuan untuk melengkapi isi buletin kami.

Akhir kata, kami mengajak seluruh pembaca untuk tidak sekadar membaca, tetapi juga turut berpikir kritis dan menyuarakan pendapatnya. Masa depan yang lebih baik hanya bisa kita wujudkan melalui kepedulian dan keterlibatan aktif dari setiap elemen masyarakat kampus.

MEDIA PARTNER



SOSIAL MEDIA



REDAKSI PELAKSANA

BULETIN CATATAN HITAM

Leo Agustino, Ph.D | Penanggung Jawab
Ika Arinia Indriyany, M. A | Pembina

Hilmi Alvinsyah | Pimpinan Umum
Barbhara Roza Laviyona | Wakil Pimpinan Umum
Yoshpia Fahrudina | Sekretaris Umum
Rachmadina Safitri | Bendahara Umum

Laras Damasaty | Ketua Pelaksana
Nisrina Rifda Assyifa | Sekretaris Pelaksana
Cut Mutia Rahma | Bendahara Pelaksana

Nawal Najiya Rasya | Pimpinan Redaksi
Nadia Larisa | Redaktur Pelaksana

Aghlia Hayatul Qolbi | Koor Hard News
Nur Aidah | Hard News
Erika Ramda Putri | Hard News
Salma Farras Hanifah | Hard News
Laras Damasaty | Hard News

Adira Dwi Fajarani | Koor Soft News
Selviana Nur Febria Sari | Soft News
Shafira Rahma | Soft News
Malica Syifa Anggraini | Soft News
Siti Naimah | Soft News

Titi Ila Ashari | Koor Desain
Nyimas Melati | Desain
Hanna Tiosenia | Desain
Qiran Ridha Elsa | Desain
Brigita Putri Marito | Desain

Salsa Elsa Ulandari | Koor Humas
Asty Dina Mardina | Humas
Aura Maulida Husna | Humas

CATATAN HITAM

02 Salam Redaksi

03 Redaksi Pelaksana
Buletin CATATAN HITAM

04 Daftar Isi

06 Menakar Komitmen Untirta dalam
Mewujudkan Kampus Inklusif bagi
Mahasiswa Disabilitas

08 Melawan Keterbatasan: Mahasiswa
Disabilitas Untirta Buktikan
Kemampuan di Organisasi Kampus

10 HIMA Pendidikan Khusus Untirta
Tingkatkan Inklusi Lewat Kelas
Braille

12 Dosen Pendamping Disabilitas Nihil,
Untirta Tertinggal Aturan Nasional?

14 FKIP Untirta: Mahasiswa Disabilitas
Terbanyak, Tapi Minim Fasilitas?

DAFTAR ISI

CATATAN HITAM

- 16** **Raih Peringkat di UI GreenMetric,
Untirta Terus Kembangkan RTH di
Tengah Keluhan Mahasiswa**
- 18** **Unit Bisnis Tidak Optimal, Untirta
Tuai Polemik Finansial Jelang
Transformasi Status PTN-BH**
- 20** **Polemik Penambahan Menteri
Kabinet, Entah Untung atau Buntung**
- 22** **Pernyataan Yusril terhadap Tragedi
98, Pengamat Politik: Sulitkan
Rekonsiliasi dan Turunkan
Kepercayaan Publik**
- 24** **BEM FISIP di Bawah Sorotan: Kritik
Tajam dari Tiga Fraksi DM**
- 27** **Dokumentasi**

DAFTAR ISI

Menakar Komitmen Untirta dalam Mewujudkan Kampus Inklusif bagi Mahasiswa Disabilitas

Oleh: Selviana Nur Febria Sari

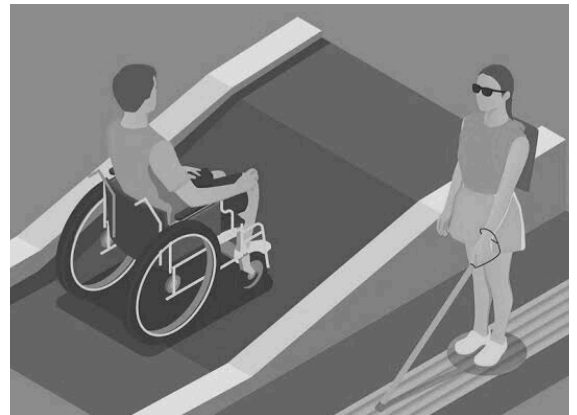
Seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap pendidikan inklusif, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) memperlihatkan komitmen yang kuat untuk menciptakan lingkungan kampus yang ramah bagi mahasiswa disabilitas. Melalui penyediaan fasilitas dan layanan yang inklusif, Untirta berupaya membangun lingkungan belajar yang mendukung mahasiswa disabilitas serta memastikan bahwa setiap mahasiswa dapat menikmati hak pendidikan yang setara tanpa terhambat oleh keterbatasan fisik atau kebutuhan khusus.

Data terbaru dari Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) menunjukkan bahwa dari tahun 2020 hingga tahun 2024 terdapat 28 mahasiswa disabilitas yang menempuh pendidikan di kampus ini, mayoritas berada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), khususnya di program studi Pendidikan Khusus.

"Untirta sebagai kampus yang inklusif pada dasarnya menerima semua mahasiswa yang memenuhi syarat, baik difabel maupun tidak," ujar Wakil Rektor 3

Untirta, Agus Sjafari saat diwawancarai langsung oleh Orange (12/11/2024).

Menurutnya, fasilitas yang mendukung mahasiswa disabilitas terus dikembangkan, meski diakui masih ada ruang untuk perbaikan



Sumber: Mahasiswa.co.id

Di sisi lain, Agus mengungkapkan jika bantuan terhadap teman-teman disabilitas juga ditunjukkan oleh rekan sesama mahasiswa. Hal ini dilakukan dengan menunjukkan empati dan kepeduliannya untuk membantu mahasiswa disabilitas beradaptasi di lingkungan kampus, "Saat ini, pendamping berasal dari mahasiswa lain yang lebih mampu dalam memberikan bantuan, misalnya membantu mahasiswa tunanetra dalam berjalan," jelas Agus.



Sumber: Canva

Walaupun pendampingan ini terbatas pada bantuan dari sesama mahasiswa, Untirta menganggap hal ini sebagai langkah awal yang penting untuk memberikan kenyamanan belajar bagi mahasiswa disabilitas.

Di samping itu, Ketua Pokja Humas Untirta, Adhitya Angga Pratama, menyampaikan bahwa Untirta memiliki komitmen yang kuat dalam mendukung kebutuhan mahasiswa disabilitas. "Untirta memiliki komitmen untuk menjadi kampus yang inklusif dan ramah bagi rekan-rekan disabilitas. Saat ini Untirta sudah memiliki fasilitas pendukung seperti ruang kuliah yang ramah difabel serta layanan pendampingan mahasiswa disabilitas, terutama di jurusan Pendidikan Khusus," ujarnya saat diwawancarai online oleh Orange via WhatsApp (18/11/2024). Ia juga menambahkan bahwa Untirta membuka jalur komunikasi melalui hotline Humas Untirta bagi calon mahasiswa disabilitas yang memerlukan informasi lebih lanjut.

Meskipun Untirta telah menyediakan fasilitas pendukung bagi mahasiswa disabilitas, peningkatan infrastruktur masih menjadi tantangan yang perlu dihadapi. Agus Sjafari mengakui bahwa fasilitas yang ada saat ini mungkin belum sepenuhnya memadai, namun Untirta terus berupaya meningkatkan komitmennya untuk menjadi kampus inklusif. "Kalau ditanya apakah sudah sangat memenuhi sarana dan prasarana, mungkin belum, tapi upaya ke sana ada, dan itu juga terbukti komitmennya," ujarnya.

Selain infrastruktur, Adhitya Angga Pratama juga menekankan pentingnya anggaran dan sumber daya manusia yang masih menjadi tantangan utama untuk mewujudkan Untirta sebagai kampus inklusif. "Terkait dengan layanan atau sarana-prasarana, tentunya terkait juga dengan anggaran. Anggaran untuk menjadi kampus inklusif itu memang besar dan tidak bisa instan, sehingga memang harus berproses. Tapi tentunya kami upayakan, pimpinan juga berkomitmen untuk merealisasikan secara bertahap layanan disabilitas yang sesuai dengan harapan," jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dari seluruh civitas akademika dalam mewujudkan kampus yang inklusif. "Civitas akademika itu beranekaragam, sehingga kami harus terus mengintegrasikan kesadaran dan budaya inklusif di lingkungan kampus. Mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidikan perlu berkolaborasi bersama untuk mewujudkan Untirta sebagai kampus inklusif," tutupnya.

Melawan Keterbatasan: Mahasiswa Disabilitas Untirta Buktikan Kemampuan di Organisasi Kampus

Oleh: Siti Naimah



Sumber: Carva

Penyandang disabilitas seringkali menghadapi stigma yang membatasi ruang mereka untuk berkontribusi dalam organisasi. Namun, di lingkungan kampus seperti Untirta, mahasiswa disabilitas telah membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk berperan aktif dalam organisasi kemahasiswaan. Melalui wadah seperti BEM, HIMA, dan UKM, mereka mampu menunjukkan kemampuan memimpin, meskipun harus menghadapi tantangan seperti adaptasi, aksesibilitas, dan candaan berbasis kekerasan. Dukungan dari rekan-rekan organisasi turut membantu menciptakan lingkungan inklusif yang memungkinkan mereka untuk berkembang dan berkontribusi secara maksimal.

Wakil Presiden Mahasiswa BEM KBM Untirta, Devililis Safitri, menyatakan bahwa ia percaya tidak ada perbedaan signifikan antara teman-teman yang memiliki keterbatasan fisik, seperti disabilitas, dengan mahasiswa lainnya. "Menurutku, gak ada hal perbedaan signifikan antara teman-teman yang memiliki keterbatasan dalam artian disabilitas dengan kita. Menurutku, mereka dalam pemikiran yang sama dengan kita sebagai mahasiswa, sama-sama menempuh pendidikan di Untirta, menurutku gak ada hal yang berbeda selagi kita sama-sama bisa berkontribusi untuk memajukan Ormawa itu sendiri," ujarnya saat diwawancarai langsung oleh Orange (2/12/2024).

Ali Darda, mahasiswa penyandang disabilitas yang juga merupakan Koordinator Wilayah BEM KBM Untirta, mengungkapkan bahwa teman-teman disabilitas juga mampu diberikan dan melaksanakan tanggung jawab di organisasi kemahasiswaan.

"Kami kaum disabilitas seringkali dipandang sebelah mata, maka dengan begitu dapat membuka teman-teman semua dan membuktikan bahwa di samping kekurangan yang kami miliki, kami juga mampu diberikan dan melaksanakan tanggung jawab pekerjaan di organisasi kemahasiswaan," ujarnya saat diwawancarai online oleh Orange via WhatsApp (25/11/2024).

Selanjutnya, Ali menambahkan bahwa saat pertama kali berorganisasi, ia mengalami kendala adaptasi dan beberapa hambatan fisik terkait aksesibilitas fasilitas. Selain itu, ia juga mengalami adanya perlakuan berbeda dari anggota lain karena keterbatasan yang dimiliki, seperti kebutuhan akan adanya penyesuaian tertentu dalam kegiatan organisasi.

Namun, seiring berjalannya waktu anggota lain mulai memahami dan memberikan dukungan sehingga terciptanya kebersamaan. Beberapa fasilitas dan kebijakan organisasi juga telah diterapkan untuk membantu dalam menjalankan perannya, seperti aksesibilitas yang memadai di ruang pertemuan dan adanya ramp.

Pengalaman setiap orang dalam berorganisasi tentunya tidak bisa disamakan, terutama teman-teman disabilitas dalam berorganisasi mengalami tantangannya tersendiri. Mereka terkadang mendapatkan candaan yang mengarah kekerasan baik verbal maupun nonverbal.

Muhammad Ikbal, mahasiswa dengan disabilitas netra yang juga menjabat sebagai anggota bidang kerohanian HIMA Pendidikan Khusus (HIMA PKh) Untirta, mengungkapkan bahwa selama berorganisasi, ia kerap kali mengalami candaan berbasis kekerasan. Meskipun demikian, ia menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang sudah biasa terjadi. "Pernah dan sangat sering, tapi saya sangat santai dan sudah biasa candaan seperti itu dengan mahasiswa pendidikan khusus," ujar Ikbal saat diwawancarai online oleh Orange via WhatsApp (29/12/2024).

Bendahara HIMA PKh Untirta sekaligus teman organisasi Ikbal, Anisah Isnaini, mengatakan bahwa ia sering sekali melihat Ikbal mendapatkan candaan tersebut dan menjadi hal biasa di jurusannya. Meski demikian, ia berharap hal semacam itu tidak dinormalisasikan begitu saja. Untuk itu, ia memilih menegur secara bercanda agar teguran tersebut lebih mudah diterima.

Lebih lanjut, Anisah mengungkapkan bahwa adanya teman disabilitas dalam organisasi sedikit mengubah paradigma orang-orang, bahwasannya disabilitas juga bisa dan mampu untuk bergabung dalam sebuah wadah organisasi, dan anggota organisasi lainnya juga bisa lebih menghargai akan adanya keberagaman. Ia juga berharap teman-teman disabilitas lebih percaya diri lagi untuk mengikuti sebuah wadah untuk mereka belajar di luar akademik.

"Harapannya teman-teman disabilitas bisa lebih percaya diri untuk mengikuti sebuah wadah untuk mereka belajar di luar akademik, karena ilmu di organisasi tidak bisa didapat dalam perkuliahan. Semoga terus bisa menjalani roda organisasi dengan sistem yang baik," harapnya.



HIMA Pendidikan Khusus Untirta Tingkatkan Inklusi Lewat Kelas Braille

Oleh: Aghlia Hayatul Qolbi

Himpunan Mahasiswa Pendidikan Khusus (HIMA PKh), Departemen Diksega Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), rutin mengadakan program kelas Braille sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap sistem tulisan Braille. Program ini tidak hanya menjadi wadah pembelajaran bagi mahasiswa, tetapi juga mendorong empati terhadap penyandang disabilitas tunanetra, serta mendukung terciptanya lingkungan kampus yang inklusif. Meskipun pelaksanaannya berjalan baik dan mendapat dukungan penuh dari kampus, program ini menghadapi sejumlah tantangan, seperti penyesuaian jadwal dan materi bagi peserta dengan tingkat pengalaman yang berbeda.

Kelas Braille dilaksanakan dua sampai tiga kali dalam sebulan dengan durasi 1 – 2 jam. Kelas Braille memperkenalkan sistem tulisan titik timbul yang digunakan oleh penyandang disabilitas tunanetra untuk membaca dan menulis. Melalui program ini, mahasiswa diajak untuk memahami teknik penggunaan alat *stylus* dan *reglet*, media utama dalam pembelajaran Braille. Dalam praktik pelaksanaannya, tidak ada modul atau materi khusus, tetapi setiap pertemuan atau kelas memiliki tema yang berbeda-beda setiap minggunya, misalnya belajar huruf atau angka.



Sumber: Carva

Penanggung jawab kelas Braille, Fauzan, menjelaskan bahwa latar belakang diadakannya program ini untuk memberikan kesempatan bagi teman-teman mempelajari huruf Braille, "Karena di jurusan ini cukup banyak untuk mahasiswa tunanetra, jadi kami mewadahi teman-teman mahasiswa untuk bisa belajar Braille," ungkap Fauzan saat diwawancarai online via WhatsApp (15/11/2024).

Restu, seorang mahasiswa yang mengikuti program kelas braille mengungkapkan motivasinya belajar braille. Sebagai penyandang disabilitas tunanetra, Restu merasa penting untuk mempelajari Braille agar dapat menerapkannya dalam kehidupan profesionalnya kelak. "Saya pribadi selaku penyandang disabilitas dan melanjutkan studi pada prodi pendidikan khusus tentunya harus bisa memahami serta menerapkan ilmu yang kita pelajari nanti di kehidupan sehari-hari, seperti bekerja menjadi tenaga pendidik anak berkebutuhan khusus yang memang nantinya kita akan memberikan pengajaran tentunya kepada peserta didik tunanetra," ujar Restu saat diwawancarai online via WhatsApp (19/11/2024).



Sumber: HIMA PKh

Sementara itu, Akmal, peserta lainnya, mengaku terdorong untuk mengikuti kelas Braille karena pengalaman temannya yang tunanetra. "Hal yang membuat saya termotivasi untuk mengikuti kelas braille tersebut karena teman saya seorang penyandang disabilitas tunanetra, dia bercerita kepada saya bagaimana proses saat mempelajari braille dan juga kesulitan yang dia hadapi saat mempelajari braille, oleh karena itu saya termotivasi dan tertarik untuk mengikuti kelas braille. Selain itu, jika saya sudah menguasai huruf braille ini, saya termotivasi untuk dapat membantu para penyandang disabilitas tunanetra" ujar Akmal saat diwawancarai online via WhatsApp (18/11/2024). Lebih lanjut, Akmal menambahkan, bahwa penyampaian materi berlangsung dengan jelas dan mudah dipahami karena melibatkan praktik langsung.

Meskipun program ini berjalan dengan baik, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi. Syerel, ketua Departemen Diksega, mengungkapkan, "Hambatan yang kami hadapi adalah kesulitan dalam menemukan jadwal yang tepat antara pengajar dan peserta, serta penyesuaian materi antara peserta baru dan yang sudah berpengalaman," ujar Syerel (17/11/2024).

Namun, dukungan dari pihak kampus, termasuk kepala jurusan dan pembina himpunan, menjadi pendorong untuk terus mengembangkan program ini. Salah satu rencana pengembangannya adalah menjalin kerja sama dengan organisasi disabilitas guna memperluas materi pembelajaran dan cakupan peserta, "Kami berencana untuk bekerja sama dengan organisasi disabilitas seputar pengembangan materi dan pengembangan sasaran dari kelas braille ini," ujar Syerel.

Melalui program ini, HIMA PKh berharap dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, mendukung mahasiswa tunanetra dalam pengembangan kemampuan mereka, serta mendorong mahasiswa non-tunanetra untuk lebih peduli dan berempati terhadap komunitas disabilitas. Akmal, salah satu peserta, menyampaikan pengalaman yang membuatnya semakin peduli terhadap teman-teman disabilitas. "Program ini membantu saya untuk lebih peduli dan berempati terhadap teman-teman tunanetra, setelah mengikuti kelas braille ternyata huruf braille itu sangat membantu untuk mereka yang menyandang disabilitas tunanetra," ujar Akmal.

Dosen Pendamping Disabilitas Nihil, Untirta Tertinggal Aturan Nasional?

Oleh: Malica Syifa Anggraini



Sumber: Canva

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2014 mengharuskan perguruan tinggi menyediakan fasilitas dan layanan khusus bagi mahasiswa disabilitas, termasuk dengan dosen pendamping khusus untuk mendukung proses akademik. Namun, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) masih menghadapi sejumlah tantangan dalam memenuhi kewajiban ini, terutama dalam menyediakan layanan akademik khusus dan pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD). Meski beberapa fasilitas sudah mendukung, implementasi inklusivitas pendidikan masih membutuhkan perhatian lebih.

Menurut keterangan dari Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan Untirta, Tb. Bahtera Rohimudin. Untirta belum mengimplementasikan terkait dengan adanya dosen pembimbing khusus untuk mahasiswa disabilitas, serta pusat koordinasi kebutuhan mahasiswa disabilitas yaitu Unit Layanan Disabilitas (ULD). Namun, fasilitas fisik di Untirta sudah mumpuni.

“Hal tersebut saya sendiri kalau hal hal seperti itu (dosen pendamping khusus) belum ada informasi ya, apakah sudah ada atau belum dan Unit Layanan Disabilitas (ULD) sendiri kan saat ini saya belum melihat ada, sepertinya belum ada, tapi untuk fasilitas ya sekarang kami sudah ada,” ujar Tb. Bahtera Rohimudin saat diwawancarai langsung oleh Orange (25/11/2024).

Meskipun beberapa fasilitas untuk disabilitas sudah tersedia, namun masih terdapat tantangan dalam proses pembelajaran. Hal ini diungkapkan oleh Sahrul Aripin, salah satu tunanetra dari Program Studi Pendidikan Khusus di Untirta, ia mengungkapkan masih menghadapi kendala dalam proses pembelajaran, terutama dalam memahami materi yang bentuknya visual.

“Momen ketika kesulitan menerima materi pembelajaran terhadap perkuliahan yaitu adanya pembelajaran visual seperti misalnya, gambar. Sangat sulit sekali untuk memahami pembelajaran yang bentuknya visual,” ungkap Sahrul Aripin saat diwawancarai online oleh Orange via WhatsApp (12/11/2024).

Di sisi lain, Untirta juga menunjukkan komitmennya untuk mendukung mahasiswa disabilitas. Hal tersebut terlihat dengan langkah kolaborasinya dengan Komisi Nasional Disabilitas melalui Penandatanganan Nota Kesepahaman MOU pada 3 Mei 2024, yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan lingkungan pendidikan yang inklusif. Melalui kerjasama ini Untirta berkomitmen meningkatkan kesadaran di kalangan mahasiswa, staf, dan masyarakat tentang isu-isu yang dihadapi oleh penyandang disabilitas.

Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan Untirta, Tb. Bahtera Rohimudin mengatakan bahwa pihak kampus sudah menerapkan sikap toleransi yang tinggi, tanpa membedakan siapapun, termasuk mahasiswa disabilitas.

“Seperti yang tadi saya sampaikan, kita itu toleransinya tinggi tidak membedakan satu sama lain. Seperti kamu kan berteman dengan siapapun tidak pernah membedakan, yang lain juga kan sama seperti itu, jadi semuanya dosen, mahasiswa saling menghargai, saling hormat dan tidak kasus apapun terhadap disabilitas,” ujarnya.

Sahrul Aripin sendiri mengatakan bahwa respons dosen dan teman-temannya masih beragam terhadap kebutuhan disabilitas, “Respon dosen dan teman teman terhadap kebutuhan disabilitas itu relatif, ada yang membantu dan ada yang tidak. Tapi kalau untuk saat ini sudah cukup membantu,” tutupnya.

Meskipun telah mendapat respons dan dukungan positif terhadap kebutuhan mahasiswa disabilitas, hal ini tetap tidak dapat mengurangi kekecewaan terhadap kenyataan bahwa Untirta masih tertinggal dalam memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2014.



Sumber: Canva

FKIP Untirta: Mahasiswa Disabilitas Terbanyak, Tetapi Minim Fasilitas?

Oleh: Adira Dwi Fajarani

Fasilitas di institusi pendidikan tidak hanya mendukung proses belajar mengajar, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap inklusivitas. Di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), mahasiswa dengan disabilitas masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di Kampus Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Ciwaru. Meski kampus ini memiliki jumlah mahasiswa disabilitas terbanyak, fasilitas pendukungnya jauh tertinggal dibandingkan Kampus Sindangsari yang telah memenuhi standar. Perbedaan ini disebabkan oleh kondisi gedung FKIP yang merupakan bangunan lama, sementara rencana perbaikan fasilitas di kampus tersebut hingga kini belum terealisasi.

Ahmad Nasrudin, Mahasiswa dengan disabilitas berkata bahwa dirinya dan juga teman disabilitas yang lain membutuhkan fasilitas khusus untuk membantu aktivitas perkuliahan mereka



Sumber: Canva

"Kami butuh pendamping gitu untuk membantu pembelajaran di kelas, selain itu juga buat teman-teman tunarungu mungkin mereka membutuhkan *clip on*, kalau tidak menggunakan itu juga bisa menggunakan juru Bahasa Isyarat kali ya. Terus juga toilet disabilitas untuk tunadaksa yang memang mengalami lemah otot gitu kan butuh pegangan buat mereka menahan biar tidak jatuh," ujar Ahmad Nasrudin saat diwawancarai online oleh Orange via WhatsApp (22/11/2024).

Lebih lanjut, Ahmad menyoroti kebutuhan *Guiding Block* di jalan kampus untuk mempermudah mobilitas mahasiswa tunanetra. "Kami memang sangat membutuhkan akses mobilitas supaya tidak terhambat gitu. Dan yang kami butuhkan untuk tunanetra itu pasti block jalur khusus agar kami punya petunjuk jalan yang memang khusus buat kami. Kalau memang gak ada kan nabrak-nabrak, jadi kalau ada jalur khusus, kami lebih percaya diri gitu," tambahnya.



Sumber: Canva

Ahmad mengatakan jika fasilitas disabilitas yang kurang memadai sangat mempengaruhi proses pembelajaran di kelas, terutama dalam memahami materi berbasis audio-visual. "Sangat berpengaruh sih kalau memang fasilitas itu kurang memadai ya untuk penunjang akademik. Contoh keberatannya, kalau dari saya sendiri, ketika di kelas ada penampilan audio visual, butuh penjelasan ulang dari teman-teman yang lihat untuk mendeskripsikan dalam video tersebut tuh apa dan apa yang disampaikan gitu. Kalau memang tidak ada yang membantu hal tersebut, ya kami tidak tahu apa yang disampaikan, paling kayak ngang-ngong aja gitu, bingung apa isinya," tambahnya.

Di sisi lain, pihak kampus menyebutkan bahwa fasilitas disabilitas di kampus Sindangsari dinilai sudah memenuhi standar Undang-Undang. Staff Wakil Rektor 1 Bidang Kemahasiswaan, Bahtera, berkata bahwa fasilitas disabilitas di kampus Sindangsari sudah sepenuhnya tersedia karena gedungnya tergolong baru. Namun, jika dibandingkan dengan Kampus Ciwaru dan Pakupatan memang belum sepenuhnya mendukung disabilitas, mengingat kedua lokasi tersebut merupakan gedung lama.

Lebih lanjut, Bahtera menyebutkan bahwa kemungkinan ke depan akan ada alokasi dana untuk memperbaiki fasilitas disabilitas, terutama di kampus FKIP. Namun, hingga saat ini belum ada usulan jelas yang diajukan terkait hal tersebut.

"Ini kan harus kolaboratif ya, jadi pimpinan sendiri kan tidak akan tahu kalau tidak ada yang mengusulkan. Yang punya mahasiswa kan Prodi, Fakultas, apakah pernah mengusulkan seperti itu. Anggaran mungkin kalau dibutuhkan kita alokasikan, tapi kalau tidak ada yang mengusulkan mau bagaimana. Jadi kembali lagi ke Prodi masing-masing, Fakultas, kalau Fakultas tidak bisa menyiapkan tinggal komunikasi di Universitas," tambahnya saat diwawancarai langsung oleh Orange (25/11/2024).

Perbedaan kualitas fasilitas di setiap kampus ini menimbulkan kesenjangan, terutama bagi mereka yang membutuhkan aksesibilitas yang setara di seluruh lokasi Untirta. Ahmad mengaku belum puas dengan fasilitas disabilitas yang kurang mendukung di kampus FKIP, ia berharap pihak kampus segera mengambil langkah nyata untuk melahirkan lingkungan belajar yang lebih inklusif.

"Mungkin harapannya untuk kampus Untirta, mudah-mudahan bisa ambil contoh dari kampus-kampus lain yang memang merupakan kampus inklusif seperti UPI, UNJ, dan UNS. Kampus-kampus di sana mungkin sudah lebih aksesibel jika dibandingkan dengan Untirta terkait dengan fasilitas," harapnya.

Raih Peringkat di UI GreenMetric, Untirta Terus Kembangkan RTH di Tengah Keluhan Mahasiswa

Oleh: Shafira Rahma



Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) berhasil meraih peringkat ke-17 dari 183 universitas di Indonesia dan ke-116 dari 1.147 universitas di dunia, dalam pemeringkatan UI GreenMetric World University Rankings 2024, dengan skor total 8.400. Pemeringkatan ini menilai keberlanjutan kampus berdasarkan enam indikator utama, salah satunya adalah penataan dan infrastruktur, termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dalam upaya memperluas RTH, Untirta terus mengembangkan ruang hijau di lima kampusnya yang berbeda. Namun, meskipun ada apresiasi dari beberapa mahasiswa, terdapat juga beberapa keluhan terkait kualitas dan kenyamanan RTH.

Ketua Pokja Humas Untirta, Adhitya Angga Pratama, mengungkapkan perluasan RTH saat ini sedang berlangsung di lima wilayah kampus, yakni Sindangsari, Pakupatan, Ciwaru, Cilegon, dan Kepandean. "RTH akan terus diperluas dan ditambah secara bertahap. Proses ini memerlukan waktu karena melibatkan perencanaan yang matang di setiap lokasi," paparnya saat diwawancarai oleh orange via WhatsApp (13/12/2024).

Komitmen ini sejalan dengan visi Untirta sebagai *Health Integrated Smart and Green Campus*. Untuk mendukung visi tersebut, HUMAS Untirta secara konsisten mensosialisasikan program berkelanjutan ini melalui media sosial. Selain itu, informasi terkait keberlanjutan kampus juga dipublikasikan melalui website green.unirta.ac.id.

Di tengah pengembangan tersebut, mahasiswa di lima kampus Untirta turut menyampaikan pandangan mereka terkait keberadaan RTH. Regita Marsha, mahasiswa FKIP dari kampus Ciwaru, mengapresiasi keberadaan RTH di lingkungannya. "Untuk ruang hijau di FKIP sudah cukup memadai karena banyak pohon-pohon besar," ujarnya saat diwawancarai oleh orange via WhatsApp (13/12/2024).

Pendapat serupa disampaikan oleh Soleh, mahasiswa keperawatan dari kampus Kepandean. Ia menilai Joglo, salah satu RTH di kampusnya, memberikan kenyamanan dalam kegiatan mahasiswa. Sementara, Regina Indriani dari kampus Sindang, mengatakan jika RTH sudah cukup memadai, hanya saja rasa panas masih terasa karena pohon-pohon belum sepenuhnya tumbuh.

Di sisi lain, Dafid Saputra, mahasiswa teknik kimia dari kampus Cilegon, mengeluhkan keterbatasan RTH yang membuat mahasiswa lebih sering menggunakan kantin sebagai tempat berkumpul. Keluhan serupa juga disampaikan oleh Kyflan Herlanda dari kampus Pakupatan, "Sejujurnya, RTH di kampus Pakupatan masih jauh dari cukup. Suhunya panas, lingkungannya monoton, dan kampus ini butuh lebih banyak area hijau agar lebih adem dan nyaman," ucapnya saat diwawancarai oleh orange via WhatsApp (13/12/2024).



Sumber: Untirta.ac.id

Menanggapi keluhan tersebut, Adhitya, menegaskan bahwa universitas terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kampus, termasuk pengembangan RTH. "Pimpinan di tingkat universitas maupun fakultas saat ini terus memacu peningkatan layanan, termasuk RTH. Namun, tentu semua butuh proses. Masukan dari mahasiswa sangat penting. Jika ada yang kurang, kami terbuka untuk eluhan atau saran agar bisa dimaksimalkan," tanggapnya (13/12/2024).

Sejalan dengan komitmen universitas tersebut, Kyflan Herlanda sebagai mahasiswa, turut menyampaikan harapannya untuk peningkatan RTH melalui penanaman pohon, peningkatan fasilitas seperti ruang belajar, charging station, dan Wi-Fi. Ia juga menekankan pentingnya edukasi terkait keberlanjutan RTH, agar mahasiswa lebih memahami dan menjaga keberadaan ruang hijau di kampus.

"Edukasi tentang pentingnya menjaga ruang hijau juga perlu ditegaskan kepada mahasiswa," tutupnya (11/12/2024).

Unit Bisnis Tidak Optimal, Untirta Tuai Polemik Finansial Jelang Transformasi Status PTN-BH

Oleh: Nur Aidah

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) diproyeksikan akan beralih status menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) pada 2025 mendatang. Namun, keputusan tersebut justru menuai keresahan mahasiswa terhadap potensi beban operasional kampus yang mungkin akan bergantung pada Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Hal tersebut didasari karena unit bisnis Untirta dinilai belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan kampus. Dalam kondisi saat ini, terhitung sejak tahun 2023, unit bisnis di beberapa PTN, termasuk Untirta sudah dihapuskan di Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan unit bisnis Untirta saat ini berada di bawah Biro Perencanaan Keuangan dan Umum (BPKU), tepatnya di Sub Bagian Rumah Tangga.

Kepala Subbagian (Kasubbag) Rumah Tangga, Untirta, Raudhatul Janah atau biasa disapa Udoh, menyampaikan bahwa walaupun unit bisnis dileburkan di bawah bagian umum, tetapi semua regulasi berjalan dengan lancar.

"Kami mengupayakan semaksimal mungkin, jangan sampai ketika di bawah kami, regulasinya menurun, tetapi kami mencoba mendongkrak yang menjadi *income generate*," ujar Udoh saat diwawancarai langsung oleh Orange (19/11/2024). Udoh juga menambahkan bahwa saat ini terdapat beberapa unit bisnis yang menjadi *income generating*, yaitu unit usaha kantin dan penyewaan fasilitas, seperti auditorium, aula, lab, dan lain-lain.

Di sisi lain, Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Umum, Asep Ridwan, menyampaikan bahwa sesuai dengan arahan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), Untirta diperbolehkan membentuk badan pengelola usaha di luar SOTK. Saat ini, pihak kampus tengah merancang *master fund* unit bisnis yang akan dinamai PT Tirtayasa Income Generating.

Lebih lanjut, Asep Ridwan menyampaikan bahwa Rektor Untirta, Fatah Sulaiman, secara langsung menunjuk nama-nama yang terlibat dalam struktur badan pengelola usaha tersebut. Terdapat sekitar dua belas usaha yang akan dikelola oleh Untirta.



Sumber: Canva



Sumber: Carva

Meskipun demikian, banyak mahasiswa yang menilai bahwa pendapatan Untirta saat ini belum siap untuk memenuhi kebutuhan finansial dengan status PTN-BH.

Ananda Eka Putri, mahasiswa Untirta Jurusan Hukum, yang juga tergabung dalam Aliansi Pendidikan Gratis (APATIS), mengatakan bahwa secara ekonomi atau unit bisnisnya, Untirta belum siap secara mandiri mengelola keuangan karena kondisi pendapatan yang belum stabil.

“Bahkan, waktu audiensi dengan pihak kampus, mereka mengakui masih mencari investor, yang menandakan bahwa pemasukan Untirta belum stabil atau tetap, hanya bersifat berkala dalam satu periode tertentu saja,” ucap Ananda saat diwawancarai online oleh Orange via WhatsApp (13/11/2024).

Pernyataan Nanda dikonfirmasi oleh Wakil Rektor II Untirta, yang juga mengatakan bahwa pendapatan unit bisnis Untirta masih belum cukup menguntungkan dan harus lebih banyak menggali income generating.

“Langkah saya sebagai penanggung jawab di bidang keuangan, surplus, dan juga kepegawaian, akan menitikberatkan pada manajemen SDM, terutama tenaga tendik. Kita harus jaga, jangan sampai kesejahteraannya menurun,” jelas Asep Ridwan saat diwawancarai langsung oleh Orange (22/11/2024).

Melihat kondisi unit bisnis Untirta yang belum optimal dalam menghasilkan pendapatan kampus, memunculkan kekhawatiran di kalangan mahasiswa Untirta terkait potensi kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Menanggapi kekhawatiran tersebut, Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum menegaskan bahwa kampus tidak memiliki opsi untuk menaikkan UKT, tetapi akan menambah jumlah kelas dan jumlah mahasiswa. Hal ini telah menjadi komitmen yang dijaga oleh Rektor Untirta, Fatah Sulaiman.

“Tapi, kalau jumlah kelas sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan kelas itu menjadi salah satu opsi yang akan kita lakukan,” tegas Asep Ridwan.

Meskipun Wakil Rektor II Untirta telah mengonfirmasi terkait UKT, tetapi kekhawatiran tentang kenaikan UKT tetap ada, terutama setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Rektor Nomor 402/UN43/KPT.HK.02/2024 tentang Penetapan Besaran UKT bagi Mahasiswa Baru Jalur SNBP dan SNBT Tahun 2024/2025. Berdasarkan surat keputusan tersebut, secara umum tercatat adanya kenaikan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) di beberapa program studi.

Polemik Penambahan Menteri Kabinet, Entah Untung Atau Buntung



Sumber: BBC.com

Presiden terpilih Prabowo Subianto, mengumumkan Kabinet Merah Putih dengan jumlah menteri lebih banyak dua kali lipat dari pemerintahan sebelumnya. Langkah ini bertujuan memperkuat kinerja pemerintah dan memperluas representasi koalisi pendukung. Namun, pengumuman yang disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (21 Oktober 2024), memicu berbagai macam reaksi publik terkait dampaknya pada stabilitas pemerintahan dan arah kebijakan nasional. Di satu sisi, penambahan menteri kabinet disambut baik karena diisi oleh para profesional. Namun di sisi lain, keputusan tersebut dianggap akan menambah beban birokrasi.

Pengamat Ekonomi Untirta, Hady Sutjipto, memandang fenomena kabinet yang gemuk ini tidak terlepas dari adanya kompensasi koalisi partai yang seringkali berujung pada praktik bagi-bagi jabatan. Hal ini menciptakan konsekuensi pada jumlah kementerian yang kini membengkak.

“Konsekuensi dari kabinet besar ini juga tidak hanya sebatas gaji menteri yang cukup tinggi, tetapi berdampak pada anggaran belanja kementerian secara keseluruhan. Selain itu, munculnya kementerian baru memerlukan fasilitas tambahan, seperti pembangunan gedung yang makin menambah biaya. Dengan demikian, kabinet yang besar ini justru kurang efisien dan cenderung menciptakan pemborosan anggaran negara,” ujar Hady saat diwawancarai online oleh Orange via WhatsApp (04/12/2024).

Penambahan menteri kabinet juga berdampak pada kebijakan efisiensi anggaran, salah satunya penghentian biaya perjalanan LPDP sejak bulan Oktober 2024. Namun, Hady menilai kebijakan ini lebih untuk menalangi anggaran kementerian baru, bukan murni efisiensi. “Penambahan posisi ini malah memperumit koordinasi dan meningkatkan belanja kementerian yang seharusnya bisa ditekan dengan jumlah menteri lebih sedikit,” jelas Hady.

Tidak ada alternatif yang dapat dilakukan terlebih hal tersebut juga sudah terjadi. Menurut Hady, paling banter hanya mengganti menteri ketika kinerjanya tidak sesuai untuk kementerian. Ia merasa agak berat karena jumlah menteri sekarang justru yang menjadi masalah, belum lagi dengan beban utama adanya utang pemerintah.

Kemudian, sebagai salah satu komponen pertumbuhan ekonomi, Hady juga mengkritik bahwa jika ingin melakukan investasi, pemerintah perlu memperhatikan jenisnya agar mampu memberikan nilai tambah bagi rakyat. "Terutama investasi asing yang di mana pemerintah pusat yang memegang kendali penuh dalam perizinan dan administrasi, sementara daerah nyaris tidak dilibatkan. Akibatnya, investasi asing, terlebih dari China, cenderung mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memberikan kontribusi signifikan bagi kesejahteraan rakyat. Kita tidak anti-investasi, tetapi perlu memastikan investasi yang benar-benar berdampak positif bagi rakyat," tekan Hady.

Sementara itu, Pengamat Politik Untirta, Ikhsan Ahmad, juga berpendapat kabinet dengan jumlah menteri yang terlalu banyak ini dipastikan suatu upaya pembagian kekuasaan. Sebagai akibat dari koalisi maupun kekhawatiran terhadap penyelenggaraan kekuasaan. Artinya, pengakomodiran terhadap pendukung politik dan lawan politik menjadi pertimbangan utama.

"Sudah pasti hal tersebut akan mempunyai repository anggaran, tapi kita belum tentu bisa melihat bagaimana efektivitas dari program-program itu. Yang pasti saat ini, banyaknya pemerintah yang justru dikelilingi oleh orang-orang yang memang bagi saya memiliki *track record* atau masa lalu yang tidak cukup menggembirakan," ujar Ikhsan saat diwawancarai online oleh Orange via WhatsApp (03/12/2024).

Namun, Ikhsan tetap memberikan apresiasi terhadap beberapa menteri profesional yang dipercaya mengisi kabinet ini. Meski begitu, ia juga menyoroti keberadaan politisi pragmatis yang lebih berorientasi pada kepentingan kelompok dibandingkan kepentingan masyarakat luas. Menurutnya, kabinet ini perlu membangun kepercayaan publik agar dapat menjamin stabilitas politik dan pemerintahan yang efektif.

"Kalau stabilitas politik tidak bisa dilihat semata-mata dari persoalan kabinet, banyak faktor yang bisa menunjukkan variabel untuk kestabilan politik. Yang pasti, kabinetnya harus membangun sebuah *trust* kepada rakyat, agar rakyat percaya bahwa pemerintahan ini memang untuk rakyat," jelas Ikhsan.



Sumber : Instagram @/prabowo.gibran2

Pernyataan Yusril terhadap Tragedi 98, Pengamat Politik: Sulitkan Rekonsiliasi dan Turunkan Kepercayaan Publik



Sumber : [Seputarlampung.pikiranrakyat](https://seputarlampung.pikiranrakyat.com)

Tragedi Mei 1998 merupakan salah satu peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia yang hingga kini masih menuai perdebatan terkait kelanjutan proses penanganannya. Di tengah isu perdebatan yang belum menemukan titik terang, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa tragedi tersebut tidak termasuk kategori pelanggaran HAM berat, sebagaimana dilansir CNN Indonesia. Pernyataan ini menuai kritik tajam dari berbagai kalangan yang menekankan pentingnya pengakuan negara untuk menjamin keadilan bagi para korban dan keluarga mereka. Merespons situasi ini, akademisi dan aktivis menyerukan langkah konkret agar tragedi tersebut tidak tersingkirkan oleh kepentingan politik.

Muhammad Rizky Godjali, Pengamat Politik, menilai pandangan Yusril cenderung sempit karena hanya berfokus pada standar hukum internasional tanpa mempertimbangkan perspektif korban. "Dalam pandangan Yusril, mungkin unsur genosida atau penghancuran terstruktur itu tidak terpenuhi di peristiwa Mei 1998. Sehingga ia menganggapnya bukan pelanggaran HAM berat," ujar Godjali saat diwawancarai langsung oleh Orange (20/11/2024).

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pengakuan negara terhadap pelanggaran HAM adalah langkah rekonsiliasi yang penting. "Pengakuan semacam itu memberikan legitimasi moral dan menunjukkan komitmen pemerintah terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia, Namun, jika pemerintah terus bersikap ambigu, proses rekonsiliasi akan sulit dicapai, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah akan menurun," tambahnya.

Sementara itu, Anggota Kastrat BEM FISIP, Akif Arya, menganggap pandangan ini sebagai langkah mundur dalam perjuangan HAM di Indonesia, mengingat banyaknya fakta yang menunjukkan sebaliknya. "Berdasarkan laporan Komnas HAM tahun 2002, tragedi 1998 jelas memenuhi unsur pelanggaran HAM berat karena adanya tindakan pembunuhan, penghilangan paksa, kekerasan seksual, dan persekusi yang meluas" paparnya saat diwawancara via WhatsApp (25/11/2024).

Sebagai kastrat di kampus, menurut Akif langkah konkret yang perlu diambil oleh mahasiswa dan aktivis adalah memperkuat kajian akademis untuk mempertegas argumentasi yuridis serta melakukan aksi damai, baik melalui media sosial maupun petisi publik. "Kita sebagai mahasiswa memiliki peran sebagai agent of change dan social control. Aksi damai adalah salah satu bentuk tanggung jawab kita untuk menekan pemerintah agar segera mengakui tragedi ini sebagai pelanggaran HAM berat," ujarnya.



Sementara itu, Godjali turut menjelaskan bahwa hambatan utama dalam pengakuan tragedi Mei 1998 sebagai pelanggaran HAM berat terletak pada aspek hukum dan politik. Ia menilai interpretasi sempit terhadap UU No. 26 Tahun 2000, yang mensyaratkan bukti keterlibatan langsung otoritas negara, menghalangi pengakuan kompleksitas peristiwa tersebut. Ia menyerukan evaluasi hukum dan kebijakan politik untuk mencapai keadilan komprehensif bagi korban.

Namun demikian, pandangan dari Godjali sebagai dosen ilmu politik dan Akif sebagai kastrat BEM Fisip sepakat bahwa pengakuan tragedi 1998 sebagai pelanggaran HAM berat sangat penting. Menurut Godjali, langkah ini tidak hanya menyangkut keadilan bagi korban tetapi juga membangun sistem hukum yang lebih baik. "Pengakuan adalah bagian dari *restorative justice*. Ini menunjukkan bahwa negara mau belajar dari kesalahan masa lalu untuk mencegah tragedi serupa di masa depan," ujarnya.

Akif menambahkan bahwa pengakuan ini juga berfungsi sebagai pendidikan sejarah bagi generasi muda. "Kita harus menanamkan kesadaran sejarah kepada generasi muda agar mereka menghormati HAM dan mencegah terulangnya peristiwa serupa," tegasnya.

BEM FISIP di Bawah Sorotan: Kritik Tajam dari Tiga Fraksi DPM

Oleh: Laras Damasaty



Sumber: Fisip.untirta.ac.id

Sejumlah Fraksi Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) memberikan evaluasi kritis terhadap kinerja BEM FISIP di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang menjadi perhatian publik. Perwakilan dari Fraksi Ilmu Pemerintahan, Fraksi Administrasi Publik, dan Fraksi Ilmu Komunikasi menyoroti catatan hitam yang terjadi selama periode ini serta harapan untuk perbaikan di masa mendatang.

Ketua Umum DPM FISIP selaku perwakilan Fraksi Administrasi Publik, Iqbal Tawakkal, tidak segan-segan menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja BEM dalam hal advokasi.

"Kami sangat menyayangkan bahwa advokasi yang diberikan BEM hanya bersifat informatif. Implementasi advokasi yang seharusnya lebih mengajak dan menghimpun mahasiswa masih kurang," ujarnya saat diwawancarai langsung oleh LPM Orange (02/12/2024).

Menurutnya, isu-isu penting seperti Uang Kuliah Tunggal (UKT) tidak ditangani dengan baik. "Kuota yang ada diambil oleh pemerintah, dan seharusnya BEM sebagai eksekutor dan payung advokasi bisa lebih berperan dalam membagi rata," tambahnya.

Sementara itu, Ketua dari Fraksi Ilmu Komunikasi, Fatih Nadaraya, menyoroti masalah bahwa BEM FISIP belum sepenuhnya mewartakan minat dan bakat mahasiswa.

"Dari segi minat dan bakat, BEM FISIP belum bisa memenuhi kebutuhan mahasiswa secara keseluruhan," ungkapnya saat diwawancarai langsung oleh LPM Orange pada (02/12/2024).

Ini menunjukkan bahwa program-program yang ada tidak mencakup semua segmen mahasiswa, sehingga banyak potensi yang tidak terakomodasi.

Di sisi lain, selaku Ketua Fraksi Ilmu Pemerintahan, Dzakwan Irawan, mengungkapkan keprihatinan terhadap evaluasi Triwulan 1 yang tidak diimplementasikan dengan baik.

"Di Cemara, kami menyadari meskipun evaluasi di versi SNBP sudah dilakukan, penerapan di SNBT masih sama, menunjukkan bahwa evaluasi tersebut tidak diterapkan dengan baik," tegasnya saat diwawancarai langsung oleh LPM Orange pada (02/12/2024).

Lebih lanjut, Dzakwan menyoroti masalah dalam pelaksanaan Sarasehan, di mana BEM FISIP mengakui bahwa, "Tercapainya target peserta hanya mencapai indeks skor 1, sementara keteresuaian tujuan dan tema mencapai 4 poin. Ini menunjukkan ketidakselarasan, dan tujuan dari Sarasehan ini belum sesuai, karena target peserta pun belum maksimal," lanjutnya.

Dalam wawancaranya, ia juga menyoroti pelaksanaan program kerja BEM FISIP pada Triwulan 2, yaitu acara Proaktif dan Kang Nong FISIP. Dzakwan menjelaskan bahwa kedua program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa dan memperkenalkan isu-isu relevan. Ia menekankan, "Ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, terutama dalam hal partisipasi mahasiswa dan penyampaian informasi yang lebih jelas".



Sumber: Canva

Dalam evaluasi Triwulan 2, Dzakwan menyoroti kesalahan dalam pelaksanaan Proaktif dan masalah konsumsi. "Banyak mahasiswa mengeluhkan kualitas makanan yang disajikan, termasuk adanya makanan yang basi," ungkapnya. Menurutnya, keluhan tersebut bukan hanya masalah kecil, tetapi berdampak langsung pada kenyamanan dan keamanan peserta selama kegiatan berlangsung.

Lebih lanjut ia berkata, "Seharusnya, jika sudah ada masukan mengenai makanan yang basi, itu bisa segera ditindaklanjuti di hari kedua,"

Dzakwan mengajak semua pihak untuk lebih memperhatikan detail agar pengalaman mahasiswa tidak terganggu dan kepuasan peserta meningkat.

Catatan hitam lainnya, diungkapkan oleh Fatih Nadaraya mengenai keprihatinannya terhadap program kerja pengabdian yang telah diselenggarakan oleh BEM FISIP. Ia menyoroti pentingnya persiapan yang matang bagi setiap anggota panitia, terutama ketua pelaksana.

Fatih menyatakan, "Di pengabdian itu, yang sangat disayangkan adalah karena dari ketua pelaksana pengabdian masih belum ikut LK 2." Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya pelatihan kepemimpinan dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program pengabdian tersebut.

Sementara itu, Iqbal Tawakkal, menyoroti masalah kaderisasi dan personal branding BEM FISIP. "Dari segi kaderisasi, kami merasa BEM FISIP kurang optimal. Personal branding BEM FISIP juga perlu diperbaiki agar mahasiswa lebih tertarik untuk bergabung," tutupnya.



Sumber: Carva

Menanggapi kritik yang disampaikan, Ketua Umum BEM FISIP, Aji Sahyudi, memberikan klarifikasi pada wawancara yang dilakukan oleh LPM Orange. Aji menegaskan bahwa meskipun ada kritik, BEM FISIP telah berupaya memberikan yang terbaik untuk mahasiswa.

Aji Sahyudi mengakui bahwa masih ada kekurangan dalam proses advokasi yang dilakukan oleh BEM FISIP. "Kita mengakui advokasi belum sempurna, tetapi kita tidak tinggal diam ketika sesuatu harus diadvokasikan," tegasnya (11/12/2024).

"BEM FISIP telah meningkatkan minat dan bakat di bidang futsal dengan berlaga di Jawara secara gratis, menyediakan baju dan konsumsi dalam Proaktif, mendukung delegasi Kang Nong FISIP dengan anggaran, serta memberikan dukungan anggaran untuk acara inaugurasi FISIP," tambahnya.

Ia juga menyampaikan harapannya untuk masa depan. "BEM FISIP berharap komunikasi lintas ormawa ditingkatkan agar terjalin citra yang baik. Hal-hal yang harus dievaluasi pun dapat ditingkatkan," Pernyataan ini menunjukkan keinginan BEM FISIP untuk memperkuat hubungan antar organisasi mahasiswa dan terus melakukan perbaikan demi mencapai tujuan bersama.



DOKUMENTASI



DOKUMENTASI





CATATAN HITAM

"Menurut saya, hal ini sangat menarik karena memberikan wawasan baru dan meningkatkan kesadaran kita terhadap permasalahan atau isu yang sedang terjadi atau kurang mendapat perhatian. Good job!"

-Rafif Hamzah, Demisioner Pimpinan Umum LPM Orange 2023 -

"Catatan Hitam" mengupas isu-isu penting yang kerap terabaikan, mulai dari urgensi menciptakan kampus inklusif bagi mahasiswa disabilitas hingga kritik terhadap kebijakan kabinet 'gemuk' yang dinilai kurang efektif. Tidak hanya itu, evaluasi tajam terhadap langkah-langkah BEM FISIP juga dihadirkan sebagai cerminan akuntabilitas dan pengaruhnya terhadap Mahasiswa.

Melalui tulisan yang mendalam dan berimbang, Buletin ini menjadi lentera yang menerangi berbagai permasalahan, sekaligus menjadi panggilan untuk perubahan menuju keadilan, transparansi dan kualitas pendidikan yang lebih baik.

Baca, pahami dan renungkan setiap tulisan dalam Buletin ini. Suara Mahasiswa adalah kekuatan dan langkah kecil untuk memahami adalah awal dari perubahan besar.

GIVING VOICE TO THE VOICELESS